

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	REALISASI KINERJA	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	TARGET KEGIATAN	REALISASI KINERJA				PENANGGUNG JAWAB	CACATAN HASIL MONITORING RENCANA AKSI	TINDAK LANJUT
										TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya kualitas pengelolaan pertanahan didukung peningkatan tertib administrasi pertanahan sesuai ketentuan perundang-undangan	Persentase permasalahan tanah yang ditangani	84	86	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	117,967,600	6,145,688,512	100%	17	18	32	33	Sekretariat	Efisiensi serapan anggaran sesuai kebutuhan yaitu efisiensi pada perjalanan belanja cetak, belanja barang pakai habis, belanja kebutuhan listrik dan belanja makan minum rapat	Akan dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
	Persentase tanah aset yang clean and clear dan bersertipikat	31	33	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	117,967,600	113,412,600	17 Laporan	3	3	5	6	Sekretariat	Efisiensi serapan anggaran sesuai kebutuhan yaitu efisiensi pada perjalanan dinas dalam daerah	Akan dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	117,967,600	113,412,600	17 Laporan	3	3	5	6	Sekretariat	Efisiensi serapan anggaran sesuai kebutuhan yaitu efisiensi pada perjalanan dinas dalam daerah	Akan dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Menyiapkan pembayaran Gaji dan tunjangan PNS serta gaji PTT	4,666,818,537	4,580,279,316	36 Dokumen	7	6	11	12	Sekretariat	Efisiensi serapan anggaran sesuai kebutuhan yaitu efisiensi pada perjalanan dinas dalam daerah	Akan dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Membayar gaji dan tunjangan tepat waktu	3,889,225,017	3,810,375,767	24 Orang/ Bulan	6	6	6	6	Sekretariat	- terealisasinya anggaran TPP, realisasi TPP - terverifikasi nya TPP untuk pencairan TPP	Akan dilakukan upaya dalam percepatan proses realisasi TPP agar target penyerapan keuangan dapat selesai tepat waktu sesuai jadwal
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Membayar gaji tepat waktu	776,263,520	768,585,049	24 Dokumen	6	6	6	6	Sekretariat	Terserapnya anggaran BPJS dengan penyesuaian nilai BPJS yang baru pada aplikasi SIPD	Akan dilakukan upaya untuk penyesuaian premi yang sudah ditentukan saat ini agar target penyerapan keuangan dan kinerja dapat selesai tepat waktu sesuai jadwal
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	Membuat laporan anggaran dan kinerja bulanan	1,330,000	1,318,500	4 Laporan	1		1	2	Sekretariat	Efisiensi serapan anggaran sesuai kebutuhan yaitu efisiensi pada kebutuhan belanja cetak	Akan dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Menyiapkan administrasi kepegawaian tepat waktu	133,592,000	130,170,000	2 Dokumen		1	1		Sekretariat	Terdapat faktor pendorong berupa percepatan realisasi anggaran pengadaan pakaian Dinas, namun realisasi bimtek (pendidikan pelatihan) belum dilaksanakan	Akan dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Melaksanakan pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	28,132,000	26,910,000	46 Paket		45 orang			Sekretariat	Ada faktor pendorong berupa percepatan pengadaan pakaian dinas pada awal triwulan	Akan dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	105,460,000	103,260,000	46 Orang	6	7	7	26	Sekretariat	Kegiatan bimtek pendidikan dan pelatihan pengukuran dan pensertifikatan untuk mendukung percepatan pensertifikatan direncanakan untuk terealisasi pada triwulan IV	Akan dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Melaksanakan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	633,659,000	630,631,221	72 Paket	12	12	12	36	Sekretariat	Anggaran sudah terealisasi sesuai target yang ditentukan	Akan dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	Menyediakan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3,262,400	3,262,400	12 Paket	3	3	3	3	Sekretariat	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan	Akan dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya				

				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Menyediakan peralatan untuk kegiatan kantor	21,922,000	21,922,000	12 Paket	3	3	3	3	Sekretariat	Terdapat efisiensi anggaran pada kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Akan dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Menyediakan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	33,372,600	33,372,600	12 Paket	3	3	3	3	Sekretariat	Sudah terealisasi target kinerja dan anggaran pada kegiatan penyediaan peralatan alat rumah tangga	Akan dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Menyediakan barang cetakan dan penggandaan	52,190,000	52,173,900	12 Paket	2	3	3	4	Sekretariat	Sudah terealisasi target kinerja dan anggaran pada kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Akan dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Menyediakan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	2,190,000	2,190,000	12 Paket	3	3	3	3	Sekretariat	Proses pencairan anggaran dengan aplikasi SIPD penatausahaan	Akan dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Membuat laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	520,722,000	517,710,321	12 Laporan	2	2	3	5	Sekretariat	- perjalanan dinas untuk penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dilaksanakan sesuai kebutuhan - Proses pencairan anggaran dengan aplikasi SIPD penatausahaan	Akan dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	260,454,000	237,148,680	15 Unit	15				Sekretariat	Percepatan pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas di triwulan I namun pengadaan peralatan dan mesin belum dilaksanakan karena masih menunggu spesifikasi dari BPN (akan dipinjam pakai kan untuk percepatan pensertifikatan di BPN)	Akan dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Meyediakan kendaraan operasional	99,456,000	93,026,680	4 Unit	4				Sekretariat	Faktor pendukung berupa percepatan pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas (sepeda motor) di Triwulan I dengan pertimbangan kebutuhan pengadaan kendaraan dinas operasional yang cukup mendesak	Akan dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Menyediakan Peralatan dan Mesin Lainnya yan	160,998,000	144,122,000	9 Unit	9				Sekretariat	Target kinerja dan realisasi anggaran sudah tercapai dikarenakan menjadi factor pendukung percepatan pelaksanaan pengadaan peralatan dan mesin	Akan dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Menyiapkan pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118,759,000	110,799,268	39 Laporan	6	6	8	19	Sekretariat	Realisasi belanja barang pakai habis, belanja kebutuhan listrik dan belanja makan minum rapat	Akan dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Menyiapkan Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14,580,000	14,580,000	12 Laporan	2	3	3	3	Sekretariat	adanya efisiensi dalam belanja barang pakai habis	Akan dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Menyiapkan Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	51,720,000	43,760,268	12 Laporan	3	3	3	3	Sekretariat	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sudah sesuai dengan tagihan dari rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Akan dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin dari segi kinerja maupun dalam penyerapan anggaran
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Menyiapkan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52,459,000	52,459,000	12 Laporan	3	3	3	3	Sekretariat	Target kinerja dan realisasi anggaran sudah tercapai	Akan dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Melsaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	386,611,400	343,247,427	25 Dokumen	3	3	12	7	Sekretariat	- Pemeliharaan kendaraan, pajak dan peralatan mesin sesuai dengan waktu dan kebutuhan (terutama dalam hal pembayaran pajak) - Faktor penghambat, proses pencairan anggaran dengan sistem baru (SIPD) Penatausahaan	Akan dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Melaksanakan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	168,402,400	125,311,900	17 Unit	3	3	5	6	Sekretariat	- Pemeliharaan kendaraan, pajak dan peralatan mesin sesuai dengan waktu dan kebutuhan (terutama dalam hal pembayaran pajak) - Faktor penghambat, proses pencairan anggaran dengan sistem baru (SIPD) Penatausahaan	Sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan program pada penyusunan rencana kerja tahun anggaran berikutnya untuk menghindari perbedaan signifikan dengan target capaian yang sudah ditentukan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan kerja dan peralatan Mesin Lainnya	74,209,000	74,207,000	103 Unit	20	20	29	34	Sekretariat	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sudah terealisasi pada triwulan II	Sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan program pada penyusunan rencana kerja tahun anggaran berikutnya untuk menghindari perbedaan signifikan dengan target capaian yang sudah ditentukan
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Melaksanakan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	144,000,000	143,728,527	1 Unit		1			Sekretariat	Pemeliharaan gedung/bangunan kantor sudah terealisasi pada Truwulan II	Sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan program pada penyusunan rencana kerja tahun anggaran berikutnya untuk menghindari perbedaan signifikan dengan target capaian yang sudah ditentukan
				PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Presentase Pengelolaan Izin Lokasi yang dilakukan di Kabupaten Malang	Mengelola Izin Lokasi yang dilakukan di Kabupaten Malang	28,664,000	28,656,000	60%	14	14	14	14	Bidang Inventarisasi dan Pengadaan Tanah	Adanya percepatan pelaksanaan kegiatan dengan koordinasi KKPR/ Izin lokasi dengan pihak terkait (DPMTSP, DPKPCK, BPN)	Akan dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
				Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberian izin lokasi di Kabupaten Malang	Memberikan izin lokasi di Kabupaten Malang	28,664,000	28,656,000	4 Dokumen	1	1	1	1	Bidang Inventarisasi dan Pengadaan Tanah	Adanya percepatan pelaksanaan kegiatan dengan koordinasi KKPR/ Izin lokasi dengan pihak terkait (DPMTSP, DPKPCK, BPN)	Akan dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin dari segi kinerja maupun dalam penyerapan anggaran
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Pemberian izin lokasi yang ditetapkan	Menetapkan izin lokasi di Kabupaten Malang	28,664,000	28,656,000	10 Dokumen	2	2	2	4	Bidang Inventarisasi dan Pengadaan Tanah	Adanya percepatan pelaksanaan kegiatan dengan koordinasi KKPR/ Izin lokasi dengan pihak terkait (DPMTSP, DPKPCK, BPN)	Akan menjadi perhatian pada tahun selanjutnya bisa dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
				PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	Menyelesaikan sengketa tanah Garapan di Kabupaten Malang	201,717,000	195,123,400	65%	10	10	14	31	Bidang Penanganan Permasalahan Tanah	Faktor penghambat, pemegang keputusan dan pengambil kebijakan bukan dari Pemkab Malang (misalnya Kementerian, Pengadilan)	Akan dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin dari segi kinerja maupun dalam penyerapan anggaran
				Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi dan termediasi	Memfasilitasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan di Kabupaten Malang	201,717,000	195,123,400	11 Dokumen	2	1	4	4	Bidang Penanganan Permasalahan Tanah	Faktor penghambat, pemegang keputusan dan pengambil kebijakan bukan dari Pemkab Malang (misalnya Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, Pengadilan)	Akan dilakukan upaya dalam penyerapan keuangan dan kinerja juga perlu memperhatikan target yang sudah ditentukan pada awal penyusunan
				Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Menginventarisir data sengketa, konflik dan perkara pertanahan di Kabupaten Malang	110,642,000	109,293,500	11 Dokumen	2	1	3	5	Bidang Penanganan Permasalahan Tanah	Faktor penghambat, pemegang keputusan dan pengambil kebijakan bukan dari Pemkab Malang (misalnya Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, Pengadilan)	Akan dilakukan upaya dalam penyerapan keuangan dan kinerja juga perlu memperhatikan target yang sudah ditentukan pada awal penyusunan
				Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sengketa, konflik, dan perkara yang termediasi	Melaksanakan mediasi terhadap pihak yang bersengketa untuk menetapkan langkah-langkah penanganan penyelesaian sengketa	91,075,000	85,829,900	11 Dokumen	1	2	4	4	Bidang Penanganan Permasalahan Tanah	Faktor penghambat, pemegang keputusan dan pengambil kebijakan bukan dari Pemkab Malang (misalnya Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, Pengadilan)	Akan dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin dari segi kinerja maupun dalam penyerapan anggaran
				PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Presentase pemenuhan ganti rugi dan santunan tanah untuk Pembangun	Menyelesaikan ganti kerugian tanah dan Santunan Tanah di Kabupaten Malang	39,781,753,194	35,608,949,374	55%	13.75	13.75	13.75	13.75	Bidang Inventarisasi dan Pengadaan Tanah	Faktor penghambat, proses pengadaan tanah peningkatan ruas jalan Gondanglegi-Balekambang menggunakan mekanisme penetapan lokasi dimana tahapannya lebih panjang dibandingkan pengadaan langsung.	Akan dilakukan percepatan dalam proses penetapan lokasi, dan pada tahun berikutnya bisa tercapai dengan maksimal

				Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan	Menyelesaikan masalah ganti kerugian dan santunan tanah	39,781,753,194	35,608,949,378	8 Dokumen	2	2	2	2	Bidang Inventarisasi dan Pengadaan Tanah	Faktor penghambat, proses pengadaan tanah menggunakan mekanisme penetapan lokasi dimana tahapannya lebih panjang dibandingkan pengadaan langsung	Akan dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin dari segi kinerja maupun dalam penyerapan anggaran
				Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Merencanakan lokasi /jumlah pengadaan tanah	39,713,236,194	35,540,432,274	3 Dokumen		1	1	1	Bidang Inventarisasi dan Pengadaan Tanah	Faktor penghambat, proses pengadaan tanah menggunakan mekanisme penetapan lokasi dimana tahapannya lebih panjang dibandingkan pengadaan langsung	Akan dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin dari segi kinerja maupun dalam penyerapan anggaran
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	koordinasi dan/atau investigasi dan melaksanakan mediasi dan musyawarah terhadap pihak yang bersengketa dalam permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah	68,517,000	68,517,000	5 Dokumen	0.7	0.7	1	1	Bidang Inventarisasi dan Pengadaan Tanah	- Percepatan pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah sebagai pendukung kegiatan penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah (belanja modal) - Penyelesaian pembebasan lahan untuk fasilitas umum Gondanglegi Balekambang, sejumlah 442 Bidang/Orang akan disampaikan setelah proses pembebasan lahan dan konsinyasi (penitipan nilai UGR), nilai yang sudah terbayar 398 Bidang dan 44 bidang belum terbayar	Sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan program pada penyusunan rencana kerja tahun anggaran berikutnya untuk menghindari perbedaan signifikan dengan target capaian yang sudah ditentukan
				PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Jumlah objek redistribusi tanah yang terealisasi	Menetapkan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah Kabupaten/Kota	1,639,492,700	1,460,458,382	65%	15	15	15	15	Bidang Penanganan Permasalahan Tanah	- Percepatan pelaksanaan kegiatan untuk memfasilitasi redistribusi tanah di wilayah Kabupaten Malang yang diselenggarakan oleh BPN; Target redistribusi tahun 2023 adalah 1.114 bidang di 2 kecamatan, yaitu Kec. Sumbermanjing Wetan (Ds. Harjokuncaran, Ds. Ringinsari, Ds. Argotirto sejumlah 1.087 bidang) dan Kec. Dau (Ds. Selorejo sejumlah 27 bidang)	Akan dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin dari segi kinerja maupun dalam penyerapan anggaran
				Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek tanah redistribusi yang terfasilitasi dan terinventarisasi	Menetapkan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	1,639,492,700	1,460,458,382	4 Dokumen	1	1	1	1	Bidang Penanganan Permasalahan Tanah	- Percepatan pelaksanaan kegiatan untuk memfasilitasi redistribusi tanah di wilayah Kabupaten Malang yang diselenggarakan oleh BPN; - Target redistribusi tahun 2023 adalah 1.114 bidang di 2 kecamatan, yaitu Kec. Sumbermanjing Wetan (Ds. Harjokuncaran, Ds. Ringinsari, Ds. Argotirto sejumlah 1.087 bidang) dan Kec. Dau (Ds. Selorejo sejumlah 27 bidang)	Akan dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin dari segi kinerja maupun dalam penyerapan anggaran
				Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	melaksanakan pengumpulan data subjek dan objek tanah obyek landreform di wilayah Kabupaten Malang melalui koordinasi dengan Pemerintah Desa serta panitia redistribusi setempat	88,200,000	88,164,000	2 Dokumen		1	1		Bidang Penanganan Permasalahan Tanah	- Percepatan pelaksanaan kegiatan untuk memfasilitasi redistribusi tanah di wilayah Kabupaten Malang yang diselenggarakan oleh BPN; - Target redistribusi tahun 2023 adalah 1.114 bidang di 2 kecamatan, yaitu Kec. Sumbermanjing Wetan (Ds. Harjokuncaran, Ds. Ringinsari, Ds. Argotirto sejumlah 1.087 bidang) dan Kec. Dau (Ds. Selorejo sejumlah 27 bidang)	Pada tahun berikutnya bisa dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
				Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	menginventarisir, melakukan peninjauan terhadap hasil inventarisasi untuk penetapan rekomendasi dan melaporkan dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait Objek Redistribusi Tanah/ Objek Reforma Agraria	1,359,908,700	1,183,566,382	30 Dokumen	4	4	4	4	Bidang Penanganan Permasalahan Tanah	Faktor penghambat, masih diperlukan Koordinasi dan Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Redistribusi Tanah yang terdapat 1.144 bidang di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Sumawe, Kec Dau.	Sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan program pada penyusunan rencana kerja tahun anggaran berikutnya untuk menghindari perbedaan signifikan dengan target capaian yang sudah ditentukan

				Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	mendata objek dan subjek rencana redistribusi tanah, mensosialisasikan rencana pelaksanaan redistribusi tanah, mengkoordinasikan	106,400,000	106,400,000	2 Dokumen	1	1	1	1	Bidang Penanganan Permasalahan Tanah	Faktor penghambat, masih diperlukan Koordinasi dan Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Redistribusi Tanah yang terdapat 1.144 bidang di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Sumawe, Kec Dau	Pada tahun berikutnya bisa dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	mendata objek dan subjek penataan akses, merencanakan penataan akses, mensosialisasikan rencana pelaksanaan penataan akses, mengkoordinasikan terhadap penetapan tanah dan penerima tanah kelebihan maksimum dan tanah absente sebagai objek landreform	84,984,000	82,328,000	2 Dokumen			0.5	0.5	Bidang Penanganan Permasalahan Tanah	- Capaian kinerja merupakan capaian kinerja dari tahun sebelumnya; - Faktor penghambat, masih diperlukan Koordinasi dengan BPN terkait penataan akses dari hasil redistribusi tanah sebelumnya;	Pada tahun berikutnya bisa dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
				PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase tertanganinya tanah kosong didalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Menangani tanah kosong di Kabupaten Malang	326,431,000	326,428,000	65%	8	8	8	41	Bidang Penanganan Permasalahan Tanah	Percepatan pelaksanaan kegiatan kinerja PTSL, namun kegiatan inventarisasi tanah aset masih belum optimal	Pada tahun berikutnya bisa dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
				Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah tertanganinya tanah kosong didalam 1 (satu) daerah Kabupaten	Menyelesaikan masalah tanah kosong	79,861,000	79,861,000	11 Laporan			1	1	Bidang Penanganan Permasalahan Tanah	- Faktor pendukung, percepatan pelaksanaan kegiatan kinerja PTSL; - Koordinasi yang baik dengan BPN dalam fasilitasi PTSL; - Terdapat kesalahan penginputan capaian kinerja pada kegiatan	Akan dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin dari segi kinerja maupun dalam penyerapan anggaran
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	melaksanakan koordinasi terkait obyek tanah yang sudah diperoleh dasar penguasaannya tetapi belum diperoleh hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	79,861,000	79,861,000	11 Laporan	2	2	3	4	Bidang Penanganan Permasalahan Tanah	- Faktor pendukung, percepatan pelaksanaan kegiatan kinerja PTSL; - Koordinasi yang baik dengan BPN dalam fasilitasi PTSL	Akan dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin dari segi kinerja maupun dalam penyerapan anggaran
				Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah tanah kosong yang diinventarisasi dan dimanfaatkan	Menyelenggarakan pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong	246,570,000	246,567,000	5 Dokumen		1	2	2	Bidang Inventarisasi dan Pengadaan Tanah	- Kegiatan ini digunakan untuk konsultasi publik pendukung pengadaan tanah dan inventarisasi tanah aset Pemkab. Saat ini masih difokuskan pada konsultasi publik untuk mendukung pengadaan tanah, sehingga inventarisasi tanah aset Pemkab akan mulai difokuskan setelah kegiatan konsultasi publik; - Faktor penghambat, pada Inventarisasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang di bawah penggunaan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang terletak di 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Lawang, Karangploso, Tirtoyudo, Ampelgading dan Bantur, 57 desa dan 205 bidang, terdapat tanah aset yang merupakan TKD yang memerlukan proses pengumpulan data yang lebih lanjut	Akan dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin dari segi kinerja maupun dalam penyerapan anggaran

				Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	1	Menginventarisasi tanah kosong di Kabupaten Malang	164,606,000	164,603,000	5 Laporan		1	1	3	Bidang Inventarisasi dan Pengadaan Tanah	- Kegiatan ini digunakan untuk konsultasi publik pendukung pengadaan tanah dan inventarisasi tanah aset Pemkab Malang melalui kegiatan konsultasi publik; - Faktor penghambat, pada Inventarisasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang di bawah penggunaan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang terletak di 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Lawang, Karangploso, Tirtoyudo, Ampelgading dan Bantur, 57 desa dan 205 bidang, terdapat tanah aset yang merupakan TKD yang memerlukan proses pengumpulan data yang lebih panjang	Akan dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin dari segi kinerja maupun dalam penyerapan anggaran
				Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong		Memfaatkan tanah kosong di Kabupaten Malang	81,964,000	81,964,000	5 Dokumen		1	2	2	Bidang Inventarisasi dan Pengadaan Tanah	- Kegiatan ini digunakan untuk konsultasi publik pendukung pengadaan tanah dan inventarisasi tanah aset Pemkab Malang melalui kegiatan konsultasi publik; - Faktor penghambat, pada Inventarisasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang di bawah penggunaan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang terletak di 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Lawang, Karangploso, Tirtoyudo, Ampelgading dan Bantur, 57 desa dan 205 bidang, terdapat tanah aset yang merupakan TKD yang memerlukan proses pengumpulan data yang lebih panjang	Akan dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin dari segi kinerja maupun dalam penyerapan anggaran
				PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Pengelolaan Izin membuka Tanah		Mengelola izin membuka tanah di Kabupaten Malang	130,792,000	130,792,000	60%	10	10	15	25	Bidang Penanganan Permasalahan Tanah	- Percepatan kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara; - Faktor pendukung, koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait pengendalian pemanfaatan tanah negara	Akan dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin dari segi kinerja maupun dalam penyerapan anggaran
				Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah Izin membuka tanah yang terbit		Menetapkan ijin menerbitkan ijin membuka tanah	130,792,000	130,792,000	7 Dokumen	1	1	2	2	Bidang Penanganan Permasalahan Tanah	- Percepatan kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara; - Faktor pendukung, koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait pengendalian pemanfaatan tanah negara	Akan dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin dari segi kinerja maupun dalam penyerapan anggaran
				Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah terfasilitasinya pengendalian pemanfaatan tanah negara		menginventarisir, menerima, meneliti, dan menganalisis pengaduan, melakukan pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah	130,792,000	130,792,000	6 Dokumen	1	1	2	2	Bidang Penanganan Permasalahan Tanah	- Percepatan kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara; - Faktor pendukung, koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait pengendalian pemanfaatan tanah negara; - Sudah terfasilitasinya penentuan status lahan Verponding 691 di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Fasilitas permasalahan PTPN XII di Tegalrejo dan Kalibakar dan Fasilitas permasalahan tanah aset Kodam Brawijaya di Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing Wetan	Akan dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin dari segi kinerja maupun dalam penyerapan anggaran

				PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan tanah yang tertera dengan baik	Menginventarisasi pengelolaan data penatagunaan tanah	997,834,200	897,659,791	60%	15	15	15	15	Bidang Inventarisasi dan Pengadaan Tanah	- Faktor penghambat, pelaksanaan TMKH dan IPPKH sangat bergantung pada kewenangan pemerintah pusat; - Terdapat perjalanan dinas luar daerah untuk koordinasi TMKH dan IPPKH dengan instansi vertikal (Kementerian LHK dan BPKH) yang belum terserap, kegiatan antara lain lahan Verponding 691 RVA di Kecamatan Wonosari, Desa Pondok Agung terkait TMKH yang masih menunggu surat keputusan peruntukan dari Kementerian LHK terkait lahan tukar guling milik warga, terkait berita acara tata batas dan supervisi yang berlokasi di Bondowoso terkait JLS; - Belanja modal pensertifikatan yang tadinya untuk pendaftaran ukur sekarang digratiskan sehingga tidak terserap dan akan disesuaikan ketika PAK; - Pengerjaan raperda zona nilai tanah yang di pihak ketiga kan masih dalam proses (belum final).	Agar padatahun berikutnya bisa dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
				Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penggunaan tanah yang tertata sesuai RTRW	Menentukan jumlah penggunaan tanah	997,834,200	897,659,791	2 Kecamatan	1			1	Bidang Inventarisasi dan Pengadaan Tanah	- Faktor penghambat, pelaksanaan TMKH dan IPPKH sangat bergantung pada kewenangan pemerintah pusat; - Terdapat perjalanan dinas luar daerah untuk koordinasi TMKH dan IPPKH dengan instansi vertikal (Kementerian LHK dan BPKH) yang belum terserap, kegiatan antara lain lahan Verponding 691 RVA di Kecamatan Wonosari, Desa Pondok Agung terkait TMKH yang masih menunggu surat keputusan peruntukan dari Kementerian LHK terkait lahan tukar guling milik warga, terkait berita acara tata batas dan supervisi yang berlokasi di Bondowoso terkait JLS; - Belanja modal pensertifikatan yang tadinya untuk pendaftaran ukur sekarang digratiskan sehingga tidak terserap dan akan disesuaikan ketika PAK; - Pengerjaan raperda zona nilai tanah yang di pihak ketiga kan masih dalam proses (belum final).	Akan dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin dari segi kinerja maupun dalam penyerapan anggaran
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	berkoordinasidengan Kepala Desa dan instansi terkait, rapat koordinasi bersama Pemerintah Desa dan masyarakat dan rapat usulan perencanaan anggaran bersama instansi terkait	77,087,720	76,335,651	2 Laporan		1		1	Bidang Inventarisasi dan Pengadaan Tanah	- Faktor penghambat, pelaksanaan TMKH dan IPPKH sangat bergantung pada kewenangan pemerintah pusat; - Terdapat perjalanan dinas luar daerah untuk koordinasi TMKH dan IPPKH dengan instansi vertikal (Kementerian LHK dan BPKH) yang belum terserap, kegiatan antara lain lahan Verponding 691 RVA di Kecamatan Wonosari, Desa Pondok Agung terkait TMKH yang masih menunggu surat keputusan peruntukan dari Kementerian LHK terkait lahan tukar guling milik warga, terkait berita acara tata batas dan supervisi yang berlokasi di Bondowoso terkait JLS	Akan dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin dari segi kinerja maupun dalam penyerapan anggaran
				Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	merencanakan lokasi/tempat untuk pemetaan zona nilai tanah, koordinasi dengan Kecamatan/Instansi terkait untuk mencari data harga tanah dan membuat data/peta zona nilai tanah	176,747,000	175,825,140	5 Dokumen		1		1	Bidang Inventarisasi dan Pengadaan Tanah	- Pengerjaan raperda zona nilai tanah yang di pihak ketiga kan masih dalam proses pembahasan (belum final)	Sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan program pada penyusunan rencana kerja tahun anggaran berikutnya untuk menghindari perbedaan signifikan dengan target capaian yang sudah ditentukan

				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	menentukan lokasi yang akan ditetapkan/penetapan onyek konsolidasi tanah, membuat desain grafis berdasarkan hasil musyawarah bersama masyarakat, penataan di bidang fisik dan yuridis lokasi tanah	743,999,480	645,499,000	4 Dokumen	1	1	1	1	Bidang Inventarisasi dan Pengadaan Tanah	- Proses pensertifikatan tahapannya cukup panjang, yaitu mulai dari pemberkasan dokumen yuridis, pendaftaran ukur, pengukuran, terbitnya sertifikat hak, pendaftaran sertifikat hak hingga akhirnya terbit SHP atas nama Pemkab Malang. Sangat membutuhkan dukungan dari BPN, OPD pengguna barang, kepala desa/turah setempat; - Berkas yang proses di BPN sudah terbit 444 Buku Sertipikat dari 152 Bidang dan Luasan total 1,812,396 m	Akan dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin dari segi kinerja maupun dalam penyerapan anggaran
--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	-----------	---	---	---	---	--	---	--

